BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW[1] yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan dalam agama islam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ ۗ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ۚ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ أَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ . وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya*: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga intermediary, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak pihak yang membutuhkan dana. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank

[1] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), h 2

Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan juga mampu memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan berbagai bidang usaha.

Kecamatan Ampek Angkek, terletak di Kabupaten Agam, di daerah ini banyak industri kecil yang bermunculan, salah satunya usaha konveksi merupakan kegiatan ekonomi di bidang pakaian dan sebagainya, yang di buat secara massal yang dijual dalam keadaan jadi, yang tidak di ukur menurut pesanan tetapi menurut ukuran yang sudah di tentukan. Konveksi merupakan salah satu pilihan usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang konveksi tersebut.

Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah merupakan apa yang dapat dilakukan oleh Bank BPRS dalam mensejahterakan masyarakat yang mempunyai usaha konveksi di kecamatan Ampek Angkek. Adapun peranan bank BPRS selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanankan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha,

bimbingan usaha ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang,sehingga nasabah menjadi tertarik untuk melakukan pembiayaan pada BPRS tersebut.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan UKM pada BPRS Ampek Angkek Candung dari tahun 20015-2017.

Tabel: 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan UKM
(2015-2017)

Tahun	Jumlah nasabah(orang)
2015	1009
2016	1090
2017	1079

Sumber: BPRS Ampek Angkek Canduang

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terdapat 1009 orang nasabah, pada tahun 2016 terdapat 1090 orang nasabah dan pada tahun 2017 terdapat 1079 orang nasabah. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2016 terdapat kenaikan jumlah nasabah, dan pada tahun 2017 terdapat sedikit penurunan jumlah nasabah.

Dari hasil wawancara awal terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain, lemahnya dalam [2]pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan pada perusahaan kecil seperti organisasi, produksi, administrasi, pembukuan keuangan, promosi, pemasaran dan sebagainya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ini disebabkan karena rendahnya

[2] Hasil wawancara dengan karyawan BPRS Ampek Angkek Canduang.

tingkat pendidikan yang mengakibatkan lemahnya pengelolaan terutama dalam persaingan yang semakin ketat.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam sebuah skripsi dengan judul **" Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek (Study kasus BPRS Ampek Angkek Candung)"**

B. Perumasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Sejauh mana Peranan Perbankan Syariah dalam Peningkatan Laba Pengusaha Konveksi di kecamatan Ampek Angkek.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan Perbankan Syariah dalam peningkatan laba pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba Kecamatan Ampek.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna untuk persyaratan untuk memenuhi salah satu syarat guna memeperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam.

b. Praktisi (Institusi/Msyarakat)

Penelitian ini berguna untuk memberi sumbangan pikiran dan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Peranan Perbankan Syariah dalam Peningkatan Laba Pengusaha Konveksi di kecamatan Ampek Angkek.

c. Studi Lanjut

Penelitian ini berguna untuk menambah literatur pengetahuan dan keilmuan tentang peran Perbankan Syariah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesulitan dalam memahami judul yang penulis maksud, maka penulis sangat memandang perlu untuk menjelaskan pengertian kata-kata berikut:

Perbankan Syariah : Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau peerbankan yang operasional dan[3] produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu

[3] Muhammad, *Bank Syariah,Problem dan Prospek Perkembangan di Indinesia*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2005), h. 110.

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[4]

Usaha Konveksi : Kegiatan ekonomi di bidang pakaian dan sebagainya, yang di buat secara massal yang di jual dalam keadaan jadi yang tidak di ukur menurut pesanan, tetapi menurut ukuran yang di tentukan.

Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah peran yang diberikan BPRS terhadap tingkat pendapatan laba atau penghasilan pengusaha konveksi yang ada di Kecamatan Ampek Angkek, apakah ada peningkatan laba usaha konveksi di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Ampek Angkek.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu dibuat ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini menganalisa bagaimana peran pembiayaan dari BPRS Ampek Angkek terhadap peningkatan laba pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek..

F. Tinjauan Studi Terdahulu

Meisya Dwi Putri, nim104046101590 (2008) "Peran Perbankan Syariah dalam Menciptakan Stabilitas Moneter di Sudann. penelitian ini menarik

[4] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), hal. 2

kesimpulan bahwa Perbankan syariah terhadap stabilitas moneter sudan yaitu melalui beberapa instrumen yang diambil BOS (Bank of Sudan) seperti instrumen tidak langsung yaitu persyaratan cadangan dan operasi pasar terbuka dan melarang segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan riba.

Sri Maryanti, (2014) " yang berjudul Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Perdesaan Di Sumatera Barat. penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Perbankan memiliki peranan yang tidak signifikan terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan.

Novia Ningsih,(2015) "yang berjudul Peran Perbankan dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. Penelitian ini menarik kesimpulan pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK).

Siti Zulaikha "Peran BPRS Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Gobongan. Penelitian ini melihat data laporan Komposisi pembiayaan UMKM di Kecamatan Godong sebelum dan sesudah BPRS berdiri yang membantu pengembangan UMKM yang dilakukan BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan margin 18% per tahun

Hardiansyah Fadli (2011) " Yang berjudul Peran Bank Syariah Dalam Penguatan Sektor UMKM" penelitian ini menarik kesimpulan bagaimanakah

peran yang di lakukan bank syariah dan sejauh mana peran perbankan syariah dalam penguatan sektor UMKM.

Irfadilla NIM. 10725000365 " yang berjudul Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam ,Studi Kasus PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru. Penelitian ini menarik kesimpulan bagaimanakah peran yang di lakukan bank syariah dalam mendorong UKM masyarakat

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Konveksi Masyarakat di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, dalam penelitian ini mengacu kepada strategi yang di lakukan perbankan syariah dalam mengembangkan usaha konveksi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.[5]

BAB I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, terdiri dari pengertian usaha konveksi, fungsi dan tujuan, serta jenis-jenis kegiatan usaha konveksi yang di lakukan masyarakat di Kecamatan Ampek Angkek.

---

[5] Abu Ahmadi, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya:PT Bina Ilmu, 1980) hal 11

Bab III metode penelitian, terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab IV hasil penelitian, terdiri didalamnya hasil dari penelitian.

Bab V penutup, terdiri didalamya kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha[6] yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara totalmenjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi parastafnya.Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan merencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan "pelatihan perbankan syariah" bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan lansung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.

Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan

[6] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,..... h. 4-6

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.[7] Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jsas-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari,[8] yaitu berbagai kalangan: ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20. Dewasa ini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001. Undang-undang perbankan syariah dalam pasal 3 menyebutkan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[9] Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam

---

[7] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*..... h. 6

[8] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 26.

[9] *Udang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet.1, h.3

produk lainnya. Seorang muslim harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaanperencanaan dimasa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-halyang tidak diinginkan.

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti bank muamalat indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan undang-undang perbankan nomor 10 Tahun 1998, bank umumpun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan, pada bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan perannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya bank syariah dianggap sangat mempunyai peran penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan normative dibentuknya lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.[10]
b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

[10] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah, (*Yogyakarta:Graha Ilmu,2007), hal 7

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarakan kepada kegitan usah yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha)
d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program binaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional, yang menyebabkan umat islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

3. Landasan Operasional Bank Syariah

Adapun landasan operasional bank syariah meliputi:

a. Menghindari riba, karena riba mengandung ketidak adilan dan dapat merusak prinsip kemitraan.
b. Memperlakukan uang hanya sebagaialat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

c. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya, juga tidak bertentangan dengan syariah.

d. Tidak membenarkan transaksi spekulasif, jual beli atas suatu barang yang belum dimiliki (garar) dan jual beli bersyarat (mengandung unsur riba).

Allah firman dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا إِلَّايَقُومُونَ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ ۗالرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ۚالرِّبَا فَمَنْ جَ اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ . وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya*: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*.

e. Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan lender dan borrower sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.

f. Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahab sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya terjadigejolak moneter.

4. Peran Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan atau lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara,telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bagsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan

kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. [11]

Khusus di bidang perbankan,sejarah telah mencatat sejak berdirinya *de bank javache* pada tahun 1872, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai saekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam.Keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam.Dengan Demikian bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

Peningkatan efesiensi mobilisasi dana, artinya adanya produk al-mudharabah al muqayyadah, berarti terjadi kebesan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor , maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga

B. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

1. Pengertian UMKM

Menurut keputusan Presiden RI No 99 Tahun 1998 pengertian usaha kecil dan menengah adalah istilah yang mengacu ke jenis usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan menengah dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk mendukung pertumbuhan

[11] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*..... h 6

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.[12]

Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan canbang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria. Usaha kecil ialah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut.[13]

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak prusahaan atau cabang perushaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan

[12] Tim Peneliti CFISL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta:CFISL, 2009), hal 14

[13] Made Dharmawati, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Rajawali Pers ,2016), hal263

jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2. **Landasan Hukum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM**)

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UMKM) tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Dalam Rancangan Undang-undang Perdagangan (RUU) hanya terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari 89 pasal yang ada antara lain:

a. Bab II tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 menyebutkan perlindungan kepada usaha kecil. Tetapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada pembahasan lebih lanjut
b. Bab IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3, disebutkan pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemikiran izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, tidak tercatat dan tidak berbadan hukum. Tidak disebutkan bagaimana dengan usaha mikro atau kecil yang sulit memperoleh izin usaha perdagangan sebagai syarat permohonan kredit, artinya adakah perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang akan mengurus perizinan. Ini belum terakomodir (berjalan) pada rancangan undang undang perdagangan. Sudah

menjadi rahasia umum bahwa untuk mengurus legalitas usaha ini berpotensi menciptakan biaya tinggi akibat adanya pungutan-pungutan liar.

c. Bab VII tentang sarana perdagangan pasal 21, tentang perlunya kemitraan antara pasar modern dengan usaha mikro atau kecil dan menengah. Ini semua akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bila peraturan pemerintahnya belum ada sementara masalah kemitraan menjadi amat penting, bagaimana nasib UMKM yang selama ini menjadi pihak yang lemah[14]

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha, karena salah satu ajaran Islam mengatakan bahwa "tangan di atas lebih mulia dari tangan dibawah", artinya memberi (orang yang berkemampuan) jauh lebih mulia dari meminta (orang yang berkekurangan). Demikian pula agama Islam mengajarkan bahwa menolong orang lain lebih baik dari pada ditolong orang lain, memberi sedekah jauh lebih mulia dari menerima sedekah, karena orang yang menerima sedekah biasanya adalah orang yang miskin. Usaha mencari rizki secara halal yang terbaik menurut ajaran Islam adalah melakukan bisnis sendiri atau berdagang, pernah menjadi pedagang berarti menjadi orang yang mandiri tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain.

3. Peranan dan kontribusi UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap

[14] Nur Syamsi Nurlan, *Indonesia Incoporated Berpilar Perbankan Syariah dan UMKM,(*Jakarta 2008) h 101

Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM dibidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum.

UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunya peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis.

4. Indikator Usaha Dikatakan Berkembang

Samir (2005:33) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut :

a. Produktivitas, yang diukur melalui perubahan output kepada perubahan di semua faktor input (modal dan tenaga kerja).
b. Perubahan di tingkat kepegawaian (output, teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status).

c. Rasio finansial (mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambah pegawai).

Keberhasilan usaha diidentikkan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan modal, dan lain-lain.

Beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha adalah sebagai berikut :

1) (Laba/*Profitability*)

Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya.

2) Produktivitas dan Efisiensi

Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.

3) Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing.

4) Kompetensi dan Etika Usaha

Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman.

5) Terbangunnya citra baik

Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, *trust internal* dan *trust external*. *Trust internal* adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan *trust external* adalah timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap *stakeholder* perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing.

C. Peran Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM

1. Peran Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia.

Berdirinya Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengan di Indonesia awalnya tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh Bank- Bank yang lain yang telah ada sebelumnya di Negara kita ini. Dimana Bank- Bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya “uang” dalam arti penghasilan dan aset, kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah oleh Muhammad Yunus yang awalnya semua itu dikemas dengan berdirinya Grammen Bank.

Grammen Bank (Grammen berarti pedesaan) yang lebih kita kenal selama ini ujut konkriknya dalam konteks Bank Syariah. Dimana institusi ini didirikan pada tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi

masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek itu ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang khusus dibuat untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan

Ketika kita mencoba melihat dalam satu decade terakhir ini, bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran Bank Syariah. Bank Syariah menawarkan alternative jasa perbankan dengan system imbalan berupa bagi hasil(profit and loss sharing principle atau Profit Margin yaitu keuntungan yang diharapkan oleh Bank Syariah, system ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak Bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini Bank syariah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif.

Filosofi Model Bank Syariah adalah Credit is fundamental right (Kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diujutkan dalam benrtuk terciptanya Usaha Kecil Menengah yang berusaha mengobtimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah Pemerintah.

Prinsip Filosofi Dasar Bagi Pengembangan Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menegah yang ada dalam masyarakat adalah, bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah

masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit

Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan Bank Syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar- benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, Bank Syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel).

Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh Bank Syariah tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota. Yang lebih menariknya dari kebijakan Bank Syariah ini dalam upya memberikan bantuan dana kepada

masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit.

Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UMKM. Seba, sektor UMKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu factor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan Perbankan Syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor UMKM.

Beranjak dari semua itu, kami sebagai penulis yakin sekali bahwasanya UMKM ini berpotensi cukup besar bagi perkembangan Perbankan Syariah karena bisa kita lihat bersama dengan mengingat kembali dari masa krisis moneter ke pasca krisis moneter, UMKM itu terbukti selalu menjadi tulang punggung perekonomian kita. Sektor UMKM memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis, dibandingkan sektor lain. Hanya memang, pemerintah masih kurang memberikan dukungan. Karena itulah bank syariah seharusnya juga masuk

ke sana. Kami optimistis, bisnis perbankan syariah, dengan mendukung pengembangan UMKM, akan lebih besar dan akan selalu eksist kedepannya.

2. Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat mendekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnyapenggunaan

produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksitransaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Usaha Mikro kecil menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satunya peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, diantaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi[15]

Dengan potensi dan berbagai kelemahan yang ada, maka diperlukan usaha-usaha agar UMKM menjadi kuat dan mandiri. Hal utama yang dapat mendorong kemajuan UMKM adalah meningkatkan keterampilan para wirausaha dengan secara terus menerus dalam melakukan kegiatan bisnis jangan terjebak dengan kelemahan. Yang terjadi saat ini adalah menghasilkan barang yang tidak dibutuhkan pasar, akibatnya barang sulit dijual. Bila hal ini yang terjadi maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Input-Proses-Output dimana hal tersebut akan menimbulkan kesulitan mencari pasar.

---

[15] Muhammad, *Bank Syariah,Problem dan Prospek Perkembangan di Indinesia*,.....h. 113.

3. Peran Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM

Financial inclusion merupakan koreksi terhadap financial exclution yang dalam penjelasannya adalah sebuah kondisi financial yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Definisi lain dari financial inclusion menurut World Bank, 2008 dan European Commision 2008 adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan entah dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Jadi tujuan dari financial inclusion di Indonesia adalah untuk dapat menyelamatkan kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti penyelamatan usaha lokal dan usaha mandiri agar tercapainya koherenitas terhadap perkembangan zaman.

Dalam perencanaan ini sebagai mana mestinya masyarakat miskin bisa mendapatkan kemudahan akses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, serta mendapatkan layanan yang pro rakyat. Perbankan syariah dapat berperan strategis dalam proses financial inclusion ini. Perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin terbuka. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor riil dikarenakan produk inti dari bank syariah, yaitu skim pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang

terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perbankan syariah harus mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sektor riil, hal ini dapat dicapai dengan membantu mengembangkan sektor UMKM program keberpihakan UMKM oleh bank syariah ditunjukkan melalui:[16]

a. inovasi strategi pembiayaan

Masing-masing Bank Syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan, misalkan Bank Syariah didirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM. Sedangkan pada BPRS bentuk strategi yang dilakukan ialah strategi dalam menjangkau sejtor UMKM dan strategi pengembangn produk pembiayaan.

b. Program Linkage

Disamping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana Bank Syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank Syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang lebih kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

c. Pilot project

Syariah dalam hal ini BPRS khususnya menjadikan Pihak Bank sebuah usaha nasabah sebagai fokus mereka dalam memberikan pembinaan. Mulai dari usaha itu dirintis sampai usaha nasabah itu mandiri.

d. Pemanfaatan dana sosial

[16] Nurhendra, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pengusaha Konveksi di BMT Agam Madani Nagari Ampang Gadang*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2013)

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syariah, Bank Syariah dan UUS diberi wewenang menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan *linkage* pada Bank Indonesia.

e. kerja sama technical assistance. (KSTA)

Perbankan Syariah juga berkerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknilogi, setiap bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah mendirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT.

Hal ini dikarenakan bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil, akan tetapi lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Selain itu, Perbankan syariah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi.

D. Laba

1. Laba Menurut Islam

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan keduanya dalam kerangka yyang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum mengatur keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah danhukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha adalah meraih laba yang merupaklan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasianya dalam kegiatan dagang dan moneter. Isalam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat,sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimanayang telah dijelaskan oleh para ulamasalaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagianya di kalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:

a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

2. **Batas Penentuan Laba dalam Islam**

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-batasan dalam kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan laba yaitu:

1) Kelayakan dalam penetapan laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, " Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak.

   Pernyaaan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang panta dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga.

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran

serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin baesar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakarakuntansi islam di atasmenjelaskan bahwa ada hubungan sebabakibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang.

3) Masa perputaran modal, peranan modal berpengaruh pada standarisasilaba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu semakin pnjangnya masa perputaran dan pertambahan tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurang tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.[17]
4) Cara menutupi harga penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan). Dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran., itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
5) Unsur-unsur pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari

[17] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Rineka Cipta. 1992). Hal. 32

waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

E. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang no 21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjaman, meminjam antara pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya dimana nasabah berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktivitas produktif.

2. Unsur-unsur yang terkandung dalam penyaluran sebuah pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam penyaluran pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum pembiayaan dicairka.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja, misalnya ada karena bencana alamatau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi pembiayaan yang diperolehnya.[18]

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa di kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi pembiayaan yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas, ada beberapa funfsi dari pembiayaan, yaitu:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan

[18] Nurhendra, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pengusaha Konveksi di BMT Agam Madani Nagari Ampang Gadang*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2013)

kegunaannya oleh bank guna suatu usahapeningkatan produktifitas. Pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha baru.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dalam hal ini produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.[19]

[19] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*..... h 304

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian ini mencoba menggambarkan dan menafsirkan peran BPRS Ampek Angkek terhadap peningkatan laba pengusaha konveksi di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian harus sesuai dengan pemilihan kasus, situasi yang akan ditempuh oleh peneliti. Dengan demikian, masalah yang diteliti tidak melebar yang akan menyulitkan peneliti.

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti perlu melakukan lokalisasi dan pemilihan kasus untuk situasi atau medan tertentu. Tanpa lokalisasi dan pemilihan kasus, penelitian dengan pendekatan kuantitatif tidak akan pernah selesai. Yang dimaksud dengan lokalisasi adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Peristiwa yang dipandang sebagai masalah, kemungkinan besar berhubungan dengan medan yang akan ditempuh oleh peneliti.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada pengusaha konveksi yang berada Nagari Batu Taba di Kecamatan Ampek Angkek. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan Nagari Batu Taba merupakan salah satu daerah yang masyarakat nya banyak membuka usaha konveksi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2018. Penulis mengumpulkan data-data atau informasi mengenai semua bahan yang berkaitan dengan Peranan Perbankan Syariah dalam Peningkatan Laba Pengusaha Konveksi di kecamatan Ampek Angkek.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. [20]Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan langsung yang ditanyakan kepada masyarakat yang menjadi nasabah pada BPRS Ampek Angkek, mengenai masalah yang dibahas yaitu Peranan Perbankan Syariah dalam Peningkatan Laba Pengusaha Konveksi di kecamatan Ampek Angkek.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah dipublikasikan dan informasi yang dikeluarkan diberbagai informasi atau perusahaan termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh secara tidak langsung, hanya didapat dari kepastian literatur buku pustaka baik bacaan maupun data yang memungkinkan serta relevan dengan penelitian, serta didapat dari situs internet. Adapun data sekunder

---

[20] Suryani, Hendrayadi,*Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemem dan Ekonomi Islam,*(Jakarta:Pranada Media Group,2015).hal 171

dalam penelitian ini data yang berhubungan dengan masalah dalam pembahasan ini serta bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan objek pembahasan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adalah sekumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi.[21] Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membuka usaha konveksi di Batu Taba, sekitar 245 pengusaha yang terdapat di 6 jorong yang ada di Nagari Batu Taba.

2. Sampel

Merupakan sebagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dalam penerapan sampel dalam penelitian, penulis mencoba menerapkan teknik quota sampling. Teknik quota sampling ini adalah pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau quota yang diinginkan. Dengan patokan pengertian tersebut dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sembarangan asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut sekitar 32 orang pengusaha konveksi yang mengajukan pembiayaan di BPRS Ampek Angkek Candung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pertanyaan/angket. Teknik ini sangat efektif dalam pendekatan survey dan lebih realibel jika pertanyaan-pertanyaannya terarah dengan baik dan efektif. Teknik

---

[21] Suryani, Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemem dan Ekonomi Islam*.....hal190

dapat berbentuk wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan berbentuk pengisian angket. Daftar pertanyaan ini diberikan langsung kepada masyarakat yang menjadi nasabah BPRS Ampek Angkek.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan (angket). Angket adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data tersebut, sedangkan penyusunan instrumen penelitian dituangkan dalam bentuk pernyataan dan pernyataan.

Metode yang digunakan adalah metode skala likert dengan diberi skor atau nilai.

Sangat setuju	(SS)	= 5
Setuju	(S)	= 4
Kurang Setuju	(KS)	= 3
Tidak Setuju	(TS)	= 2
Sangat tidak setuju	(STS)	= 1

Sehingga dengan menggunakan pilihan jawaban tersebut responden dapat memahami pernyataan yang diajukan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Instrument penelitian

Variabel	Indikator	Kisi-kisi Instrument
Pembiayaan (X)	1. masyarakat mudah mendapatkan pinjaman jasa keuangan 2. tersedianya dana untuk peningkatan usaha masyarakat	1-3 4-6
Laba (Y)	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Membaiknya ekonomi masyarakat 3. Semakin berkembang usaha masyarakat	7-9 10-12 13-15

G. Teknik Analisa Data

1. Uji Instrument

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran dan keshahihan suatu alat ukur. Alat ukur dikatakan valid jika alat yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefenisikan suatu variabel.[22]

Hubungan antara satu tes atau pengukuran dengan satu kriteria biasanya digambarkan dengan nilai korelasi, yang disebut koefisien validitas yang lebih besar dari 0,60 dan koefisien validitas yang berkisar antara 0,30-0,40 dapat dianggap cukup tinggi, pengukuran yang dilakukan dengan cara korelasi factor, yanggunakan rumus *product momen karel pearson* sebagai berikut:

$$r = \frac{[n(\sum xy) - (\sum x)(\sum Y)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]\,[n(\sum y^2) - (\sum y^2)]}$$

Dimana :

r = nilai koefisien korelasi suatu item dengan nilai item total

$\sum x$ = jumlah skor setiap item

$\sum xy$ = jumlah hasil perkalian skor seluruh item

$\sum x^2$ = jumlah kuadrat skor item

$\sum y^2$ = jumlah skor kuadrat seluruh item

[22] V. Wiratna sujarweni,Poly Endrayanto,*Statistika Untuk Penelitian*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2012).hal 177

$(\sum y)^2$ = jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel y

N = jumlah responden[23]

Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, yaitu dengan mengkorelasi jumlah skor faktor dengan skor total, jika korelasi faktor positif dan besarnya 0,3 keatas dapat dianggap sebagai kontruksi kuat atau instrumen memiliki validitas yang baik.

b. Uji Reliabilitas

Reliabitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukuran yang terpercaya (reliabel). Relibilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner.[24] Untuk uji reliabilitas yang baik menggunakan metode internal *consistency* dalam kenyataan hampir tidak pernah ditemukan dua tes dengan bentuk sama (*paralel forms)*.

Pengujian reliabel dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Instrument penelitian dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* < 0,60[25] maka instrument penelitian dianggap tidak reliabel, sebaliknya jika semakin tinggi nilai *alpha* mendekati satu (1,00) maka semakin baik pula konsistensinya.

---

[23] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 48

[24] V. Wiratna sujarweni,Poly Endrayanto,*Statistika Untuk Penelitian*.....hal 186

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1998), hal 236

2. Analisa Data

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah suatu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*).[26] Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data untuk melihat berapa besarnya peran Bank Syariah terhadap tingkat pendapatan usaha konveksi di Nagari Batu Taba, digunakan analisa data kuantitatif dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

y = peningkatan laba

a = nilai konstan y, jika x = 0

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

x = pembiayaan dari BPRS

b. Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui apakah ada hubungan variabel X (jumlah pembiayaan) dengan variabel Y (peningkatan pendapatan) maka penulis menggunakan rumus koefesien Korelasi:

---

[26] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*..... hal 284

$$r = \frac{n\,(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\,(\sqrt{(\sum_x 2) - (\sum_{x)}\,2}\,\sqrt{(\sum_x 2)} - (\sum_x 2)}$$

Dimana:

r : koefesien

x : pembiayaan

y : peningkatan laba

n : jumlah data

3. Uji Hipotesis

a. Uji F (Uji serentak)

Uji-F (uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel independent secara bersama-sama (serentak) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Pengujian ini menggunakan bantuan softwere SPSS 15.0. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:Ho = tidak terdapatnya pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan laba usaha konveksi di Batu Taba.

Ha = terdapatnya pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan laba usaha konfeksi di Batu Taba

Kriteria pengambilan keputusan (KPK).

H0 diterima, apabila tingkat signifikan $\geq 0{,}05$

H1 diterima, apabila tingkat signifikan $\leq 0{,}05$

Rumus:

$$\text{F hitung} = \frac{\frac{r^2}{k}}{\frac{(1 - r^2)}{(n - k - 1)}}$$

Dimana:

f : f hitung

r^2 : determinasi

n : sampel

k : jumlah variabel independen

b. Uji T

T- test digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independent (peran Bank Syariah) variabel dependent (peningkatan laba) usaha konveksi di Nagari Batu Taba.

Dimana:

Ho = tidak terdapatnya pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan laba usaha konveksi di Batu Taba.

Ha = terdapatnya pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan laba usaha konfeksi di Batu Taba

Dengan rumus:

$$t = \frac{r}{\frac{\sqrt{1-r^2}}{n-2}}$$

Keterangan :[27]

t = nilai t-test

r = koefesien korelasi

n = periode

[27] Ridwan dan Sunarti, *pengantar Statistik*, (Bandung;L.p), Cet.Ke- 1, h.97

c. Uji r^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi (r^2) berfungsi untuk mengetahui signifikansi variabel maka harus dicari koefisien determinasi (r^2). Koefisien determinasi menunjukan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan varibel independen menerangkan variabel dependen. Jika determinasi (r^2) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel dependen. Hal ini berarti, model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen.

Sebaliknya jika determinasi (r^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan bantuan softwere SPSS 22.

Rumus:

$$r^2 = \frac{[n(\sum xy) - (\sum x)(\sum Y)]^2}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]\,[n(\sum y^2) - (\sum y)^2}$$

r = koefisien

x = pembiayaan

y = laba

N = jumlah sampel

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT BPRS Ampek Angkek Candung

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejak tahun 1999 ini merupakan hikmah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 sebagaimana krisis ekonomi dan moneter juli 1997 telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Dari kondisi itulah industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar bisa. Diawali dengan tujuan untuk mengurangi ruang gerak para rentenir yang ada di kecamatan Ampek Angkek Candung, maka para perantau masyarakat Ampek Angkek Candung di Jakarta dan Bandung bertekat untuk mendirikan BPR untuk membantu masyarakat dalam berusaha.

Pada tahun 1996 akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan SK No 32/57 Kep/Dir pada tanggal 14 Mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah (bagi hasil) dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Ampek Angkek dan Candung sebagaimana tercantum dalam akta notaries H. Sofyan, SH No 1 tanggal 2 Februari 1998.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Ampek Angkek Candung secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juli 1999 yang

tumbuh dan berkembang sebagai bank memadukan dunia usaha dengan nilai-nilai sosial dan kerakyatan dalam menjalankan operasionalnya.

Bulan Desember 2010 PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Ampek Angkek dan Candung telah memiliki 1 Kantor Pusat yang beralamat di Simpang Parit Putus Ampek Angkek dengan No telp (0752)3165, (0752) 626146 dan satu Kantor Cabang yang beralamat di JL. Jakarta No 4 belakang Kasda payakumbuh dengan No telp (0752) 9345 serta 2 kantor kas, antara lain :

a. Kantor Kas Baso yang beralamat di depan pasar Baso dengan no telp (0752) 426851
b. Kantor Kas yang beralamat di Simpang Biaro dengan no telp (0752) 426850

Adapun maksud dan tujuan didirikannya BPRS Ampek Angkek Candung ini adalah:

a. Sebagai salah satu lembaga keuangan berdadarkan prinsip syariah dengan niat ibadah dan sebagai jembatan bagi pihak yang mepunyai kelebihan dan dengan pihak yang membutuhkan dana.
b. Ikut memberdayakan potensi alamdan sumber daya manusia ke tingkat yang lebih tinggi

Secara umum BPRS Ampek Angkek Candung bertujuan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara:

1) Memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat perdesaan
2) Membuka dan memperluas lapangan kerja terutama bagi anak nagari dilingkungan Ampek Angkek Candung supaya dapat mengabdi di daearahnya.
3) Untuk berpartisipasi dalam memberantas rentenir

Secara khusus BPRS Ampek Angkek Candung bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kemasyarakat (sebagai fungsi utama sebuah bank). Sedangkan tujuan financial dengan didirikan PT. BPRS Ampek Angkek Candung yaitu untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil.

Adapun visi dan misi PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah menjadikan suatu lembaga yang amanah dan professional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat .

Misi dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah:

a) Memberdayakan ekonomi umat terutama usaha mikro kecil menengah.
b) Memberikan layanan terbaik dan memuaskan serta amanah bagi para mitra usaha
c) Memiliki sistem dan tata kerja yang uggul dengan sumber daya insani yang professional, kompeten, handal dan menunjang tinggi ukhuwah islamiyah.
d) Memberikan manfaat optimal bagi para stakeholder dan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa.

2. Ketentuan Dasar Calon Nasabah BPRS Ampek Angkek Candung

a. Kebijakan Pokok Penghimpunan Dana Yang Sehat

1) Prosedur penghimpunan dana yang sehat

Setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif dan dana yang diterima dari nasabah juga harus dinilai objektif serta diyakini oleh pejabat bank bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang halal dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum positif.

2) Penghimpunan dana dalam perhatian khusus

Merupakan penghimpunan dana yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mempunyai resiko tinggi atau yang mencurigakan.

3) Pengkinian data

Upaya untuk melengkapi dan memperbaharui data para nasabah yang dilakukan dengan cara menyeleksi kembali data nasabah yang telah masuk dengan formulir terkini.

4) Penyelesaian pengaduan

Penyelesaian pengaduan nasabah dana yang bermasalah harus diselesaikan dengan program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui pada tingkat Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

5) Penghimpunan Dana Yang Harus Dihindari

Dana yang harus dihindari adalah dana yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan kebijakan pemerintah antara lain dana dari money loundry, korupsi, hasil perjudian dan lain-lain. Dimana ketetapan pelanggaran

penerimaan dana seperti ini ditetapkan dengan surat keputusan direksi dan harus dipatuhi oleh semua pejabat dan karyawan.

6) Jenis Penghimpunan Dana Berdasarkan Tujuan, seperti:

a) Keamanan, dengan menggunakan akad *alwadi'ah* (titpan).

b) Investasi dengan menggunakan akad bagi hasil (Mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah).

c) Sosial, dalam bentuk penerimaan zakat, infaq, sadaqah, waqaf, dan hibah.

3. Produk – produk BPRS Ampek Angkek Candung

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Al Wadi'ah

1) Tabungan Al wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendaki.

2) Tabungan wadi'ah juga simpanan pihak ketiga kepada bank (perorangan) atau badan hukum dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya.

3) Tabungan wadi'ah yang diterapkan oleh BPRS adalah *al-Wadi'ah Yad ad-Dhamamah,* yaitu titipan dana nasabah kepada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dimana bank meminjam akan mengembalikan titipan secara utuh. Dan *AL-wadi'ah yad amanah* yaitu dana yang diamanahkan oleh nasabah

kepada bank untuk dikelola atau diberikan kepada nasabah lain sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan Tabungan Al Wadi'ah

1) BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
2) Dana titpan dapat diambil setiap saat.
3) BPRS dapat memberikan bonus kepada nasabah selama tidak dituangkan dalam perjanjian.
4) Apabila terjadi selisih antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat dipembukuan BPRS, maka saldo yang dianggap benar adalah yang tercatat dipembukuan BPRS.
5) Apabila penabung meninggal dunia sedangkan saldo tabungannya masih ada pada BPRS, maka saldo tabungannya akan diserahkan kepada ahli waris yang sah.

c. Deposito

1) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank (UUD RI No. 1998).
2) Jangka waktu deposito ditetapkan 1 bulan sampai 12 bulan.
3) Sebagai bukti bagi deposan bank menerbitkan bilyet deposito asli sesuai prosedur yang berlaku atas nama deposan dan diberikan kepada yang bersangkutan.

4) Nominal deposito terendah dan nisbah bagi hasil yang berlaku dalam periode tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
5) Pajak atas bagi hasil deposito dibebankan kepada deposan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
6) Setiap pencairan deposito dibebankan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Deposito yang telah jatuh tempo tidak ada pernyataan perpanjangan secara otomatis oleh deposan dan belum dicairkan dianggap sebagai dana titipan deposan pada BPRS dan tidak mendapatkan bagi hasil.
8) Apabila bilyet deposito hilang dalam masa deposito belum jatuh tempo deposan wajib melaporkannya kepada BPRS disertai surat keterangan kehilangan dari yang berwajib untuk mendapatkan bilyet deposito.
9) Terhadap deposan meninggal dunia maka pada waktu deposito jatuh tempo diminta kepada ahli warisnya yang sah untuk menerima pencairannya.

Deposito Mudharabah

1) Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2) Jangka waktu deposito ditetapkan 1 bulan sampai 12 bulan.

3) Sebagai bukti bagi deposan, BPRS menerbitkan bilyet deposito sesuai prosedur yang berlaku atas nama deposan dan diberikan kepada yang bersangkutan.
4) BPRS menyelenggarakan prinsip Deposito Mudharabah yaitu deposito yang deposannya (Shahibul Maal) memberikan wewenang sepenuhnya kepada bank (Mudharib) untuk menginvestasikan kepada usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

2. Produk penyaluran dana

a. Pengertian

Penyaluran dana adalah transaksi penyedian dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syari'ah islam dan standar akuntansi perbankan syari'ah serta tidak termasuk jenis penyaluran yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.

b. Fungsi penyaluran dana

Penyaluran dana berfungsi:

1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang
2) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
3) Meningkatkan aktifitas investasi dan pemerataan pendapatan
4) Sebagai sumber utama pendapatan bank

c. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada pedoman yang berlalu sebagai berikut:

1) Penerapan Prinsip kehati-hatian

Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana bank itu sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

2) Kebijakan penyaluran dana pihak terkait

Dalam menentukan besarnya plafond bagi nasabah pihak terkait diperlukan adanya ketentuan khusus, pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank. Bank dalam penyaluran dananya harus berusaha mengurangi resiko sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada pencairan dana, selain itu juga tujaun penyaluran dana untuk pemerataan kesempatan penyaluran dana bagi yang mendapatkan dana dari bank.

3) Penyaluran dana yang beresiko tinggi

Bank wajib melakukan penilaian secara berkesinambungan mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang mengandung resiko tinggi. Setiap pejabat bank yang terkait dengan penyaluran dana harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam penyaluran dana kepada nasabah yang terkait untuk memperkecil resiko terjadinya penyaluran dana bermasalah.

4) Jenis penyaluran dana berdasarkan tujuan

   a) Modal kerja

      Yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau perdagangan barang dalam rangka usaha

   b) Investasi

      Yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana usaha dan yang dipersamakan dengan itu

   c) Konsumtif

      Yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

5) Tata cara penilaian kualitas penyaluran dana

   Mengacu pada ketentuan kualitas aktiva produktif sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

6) Profesionalisme dan integritas pejabat penyaluran dana

   Kriteria pejabat penyaluran dana adalah:

   a) Mempunyai keahlian dan keterampilan teknis dalam berbagai praktek kegiatan perbankan

   b) Professional, amanah, objektif dan cermat

   c) Taat asas terhadap perturan

   d) Menyadari dan memahami sepenuhnya peraturan perbankan

d. Produk Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Akad murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang ingin melakukan pembelian barang dalam rangka memenuhi kebutuhan berupa barang-barang konsumsi, pengadaan barang dagangan, bahan baku dan bahan dalam proses, tidak termasuk proses produksi, barang modal seperti mesin dan sejenisnya, barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan disetujui bank.

Ketentuan-ketentuan murabahah

Ketentuan murabahah berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan atau asuransi
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akas wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

4. **Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung**

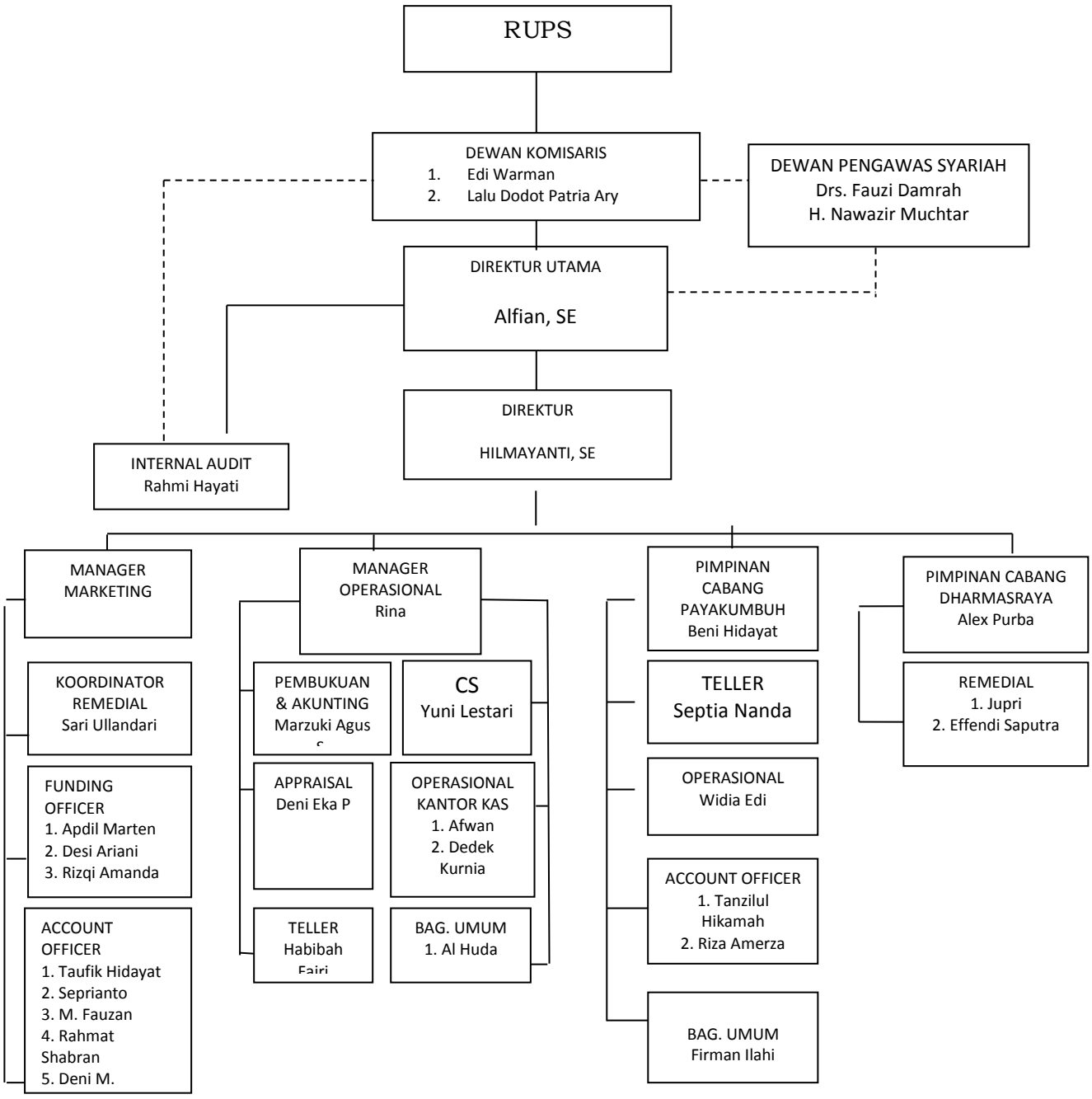

Sumber: BPRS Ampek Angkek Candung

B. Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, diperoleh data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan masyarakat pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	12	37,5%
2	Perempuan	20	62,5%
Jumlah		32	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat sebagian besar pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek adalah perempuan sebanyak 20 orang atau 62,5%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan data responden jumlah pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek berdasarkan tingkatan umur responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Identitas responden berdasarkan umur

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	17-23 tahun	1	3,12%
2	24-30 tahun	4	12,5%
3	31-40 tahun	14	44%
4	>41 tahun	13	40,6%
Jumlah		32	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat sebagian besar pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek adalah masyarakat yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 14 orang atau 43,75%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data responden jumlah pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek berdasarkan tingkat pendidikan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut

Tabel 4.3
Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	4	12,5%
2	SLTP	8	25%
3	SLTA	17	53,12%
4	DIPLOMA	1	3,12%
5	SARJANA	2	6,25%
Jumlah		32	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat sebagian besar pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek sebagian besar berpendidikan SLTA sebanyak 17 orang atau 53,125%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari sampel yang diambil diketahui jumlah pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek berdasarkan pekerjaan yang telah dikelompokkan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Identitas responden berdasarkan pekerjaan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pelajar / mahasiswa	0	0%
2	Wiraswasta	32	100%
3	Pegawai N / S	0	0%
Jumlah		32	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat sebagian besar pengusaha konveksi di kanagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek dikelompokkan berdasarkan pekerjaan sebagian besar adalah wiraswasta sebanayak 32 orang atau 100%.

C. Tanggapan Responden Mengenai Pembiayaan

Dari hasil penelitian Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Konveksi Masyarakat Di Kanagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek maka dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernyataan yang disebarkan. Setelah perhitungan setiap indikator variabel pembiayaan (X) dan variabel laba (Y) yang dilakukan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dengan adanya pembiayaan maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan dengan adanya pembiayaan maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Dengan Adanya Pembiayaan Maka Masyarakat Akan Lebih Mudah Mendapatkan Pinjaman Untuk Modal Usaha

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	9	28%
Setuju	14	44%
Sangat Setuju	9	28%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Dengan adanya pembiayaan maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 14 orang (44%)

2. Syarat yang diberikan pihak bank tidak memberatkan masyarakat

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan syarat yang diberikan pihak bank tidak memberatkan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Prosedur Yang Diberikan Pihak Bank Tidak Memberatkan Masyarakat

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	1	3,12%
Tidak Setuju	2	6,25%
Kurang Setuju	7	21,9%
Setuju	15	46,9%
Sangat Setuju	7	21,9%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Syarat yang diberikan pihak bank tidak memberatkan masyarakat" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46,9%)

3. Prosedur yang diberikan pihak bank tidak memberatkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan prosedur yang diberikan pihak bank tidak memberatkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Prosedur Yang Diberikan Pihak Bank Tidak Memberatkan Masyarakat Untuk Memperoleh Pembiayaan

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	5	15,6%
Kurang Setuju	5	15,6%
Setuju	21	65,6%
Sangat Setuju	1	3%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Prosedur yang diberikan pihak bank tidak memberatkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 21 orang (66,6%).

4. Pembiayaan yang diberikan pihak bank digunakan untuk usaha

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan pembiayaan yang diberikan pihak bank digunakan untuk usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Pembiayaan Yang Diberikan Pihak Bank Digunakan Untuk Usaha

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	3	9,4%
Setuju	8	25%
Sangat Setuju	21	65,6%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Pembiayaan yang diberikan pihak bank digunakan untuk usaha" sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 21 orang (65,6%).

5. Usaha masyarakat semakin meningkat setelah melakukan pembiayaan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan usaha masyarakat semakin meningkat setelah melakukan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Usaha Masyarakat Semakin Meningkat Setelah Melakukan Pembiayaan

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	10	31%
Setuju	3	9,4%
Sangat Setuju	19	59,4%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Usaha masyarakat semakin meningkat setelah melakukan pembiayaan" sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang (59,4%).

6. Pembiayaan yang diberikan pihak bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha masyarakat

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan pembiayaan yang diberikan pihak bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Pembiayaan Yang Diberikan Pihak Bank Sangat Berpengaruh Terhadap Peningkatan Laba Usaha Masyarakat

Tanggapan	**Frekuensi**	**Present(%)**
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	3%
Kurang Setuju	8	25%
Setuju	4	12,5%
Sangat Setuju	19	59,4%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Pembiayaan yang diberikan pihak bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha masyarakat" sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang (59,4%).

D. Tanggapan Responden Mengenai Laba

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba mengenai Peran Bank Syariah, indikatornya meliputi:

1. Dengan adanya laba maka pendapatan masyarakat akan meningkat

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan Dengan adanya laba maka pendapatan masyarakat akan meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Dengan Adanya Laba Maka Pendapatan Masyarakat Akan Meningkat

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	0	0%
Setuju	15	46,9%
Sangat Setuju	17	53,12%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden tabel 4.11 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap dengan "Adanya laba maka pendapatan masyarakat akan meningkat" sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang (53,12%)

2. Kehidupan masyarakat semakin membaik

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan kehidupan masyarakat semakin membaik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Kehidupan Masyarakat Semakin Membaik

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	3,12%
Kurang Setuju	5	15,6%
Setuju	21	65,6%
Sangat Setuju	5	3,75%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.12 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Kehidupan masyarakat semakin membaik" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 21 orang (65,6%)

3. Masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhnnya

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhnnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Masyarakat Dapat Memenuhi Semua Kebutuhannya

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	7	21,9%
Setuju	17	53%
Sangat Setuju	8	25%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.13 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhnnya" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 17 orang (53,12%)

4. Dengan adanya laba maka perekonomian rumah tangga masyarakat semakin membaik

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan dengan adanya laba maka perekonomian rumah tangga masyarakat semakin membaik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Tingkat Pengangguran Masyarakat Menurun

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	14	44%
Setuju	15	46,9%
Sangat Setuju	3	9,4%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.14 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Dengan adanya laba maka perekonomian rumah tangga masyarakat semakin membaik" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46,9%)

5. Tingkat pengangguran masyarakat menurun

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan dengan tingkat pengangguran masyarakat menurun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Tingkat Pengangguran Masyarakat Menurun

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	14	44%
Setuju	15	46,9%
Sangat Setuju	3	9,4%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden tabel 4.15 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Tingkat pengangguran masyarakat menurun" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46,9%)

6. Masyarakat dapat membuka peluang kerja

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan masyarakat dapat membuka peluang kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Masyarakat Dapat Membuka Peluang Kerja

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	3,12%
Kurang Setuju	4	12,5%
Setuju	20	62,5%
Sangat Setuju	7	21,9%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Masyarakat dapat membuka peluang kerja" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 20 orang (62,5%)

7. Dengan adanya laba maka usaha masyarakat akan semakin berkembang.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan dengan adanya laba maka usaha masyarakat akan semakin berkembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Dengan Adanya Laba Maka Usaha Masyarakat Akan Semakin Berkembang

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	5	15,6%
Setuju	9	28%
Sangat Setuju	18	56%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden tabel 4.17 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Dengan adanya laba maka usaha masyarakat akan semakin berkembang" sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang (56,25%)

8. Masyarakat dapat membuka usaha baru

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan masyarakat dapat membuka usaha baru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Masyarakat Dapat Membuka Usaha Baru

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	2	6%
Setuju	18	56%
Sangat Setuju	12	37,5%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan jawaban responden tabel 4.18 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Masyarakat dapat membuka usaha baru" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 18 orang (56,25%)

9. Dengan berkembangnya usaha maka semakin menurun tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan dengan berkembangnya usaha maka semakin menurun tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Dengan Berkembangnya Usaha Maka Semakin Menurun Tingkat Kemiskinan Di Kalangan Masyarakat

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	5	16,6%
Setuju	15	46,9%
Sangat Setuju	12	37,5%
Total	**32**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap "Dengan berkembangnya usaha maka semakin menurun tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat" sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46,9%)

E. Uji Instrumen

Sebelum melakukan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrument. Pengujian instrument digunakan untuk mendapatkan data yang sahih (valid) dan handal (reliabel) secara empiris.

1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur berhubungan dengan suatu pengujian item-item dalam kuesioner yang akan digunakan. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis korelasi yaitu dengan menghitung korelasi antar nilai keseluruhan yang diperoleh dari setiap pertanyaan dengan keseluruhan atau skor totalnya. Skor total adalah skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item pernyataan. Apabila skor totalnya lebih besar dari 0,3 maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut mempunyai validitas. Hasil pengujian validitas dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen pada tabel 4.20 :

Tabel 4.20
Uji Validitas

Item	Corrected Item Total Correlation	Status
Pembiayaan		
P1	,635	Valid
P2	,277	Tidak Valid
P3	,663	Valid
P4	,552	Valid
P5	,631	Valid
P6	,524	Valid
Laba		
P1	0,267	Tidak Valid
P2	0,445	Valid
P3	0,593	Valid
P4	0,289	Tidak Valid
P5	0,328	Valid
P6	0,339	Valid
P7	0,533	Valid
P8	0,461	Valid
P9	0,470	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa dari 15 item pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian ini ada 3 buah item pertanyaan yang tidak valid, karena terbukti angka yang terdapat pada

variabel itu kurang dari < 0,30 sehingga dinyatakan gugur. Sedangkan setiap item yang dinyatakan valid yaitu sebanyak 12 item

b. Uji Reliabilitas

Analisis reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih metode yang digunakan dalam analisi reliabilitas ini adalah metode *Cronbach Alpha,* nilai *Cronbach Alpha* ditunjukkan oleh nilai *alpha*. Pengambilan keputusan reliabilitas dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha*, jika *alpha cronbach* ≥ 0,60 berarti instrumen tersebut dapat dikatakan handal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Jumlah Item	*Cronbach Alpha*	Keterangan
1	Pembiayaan (X)	6	0,783	Reliabel
2	Laba (Y)	9	0,739	Reliabel

Sumber : data primer diolah

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai *cronbach alpha (a).* Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* (*a*) > 60% yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya bila alpha (a) < 60 maka dianggap kurang handal, artinya apabila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien *alpha (a)* yang cukup besar yaitu > 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

F. Analisis Penelitian

1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana ini untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sekaligus dalam rangka membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Persamaan regresi sederhana berguna untuk melihat pengaruh dari masing-masingvariabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS*). Untuk melakukan pengujian pengaruh ini, digunakan analisa regresi sederhana. Hasil analisa regresi sederhana dapat dijelaskan pada tabel pada lampiran.

Kemudian nilai koefisien regresi masing-masing variabel diatas dapat disubstitusikan ke persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$y = b_0 + b_1 x$$

$$y = 28{,}794 + 0{,}361\ x$$

$$7{,}327 + 3{,}239$$

F hitung = 5,011

$R^2 = 0{,}143$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta memiliki nilai koefisien regresi sebesar 28,794 satuan dengan arti bahwa Laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba sudah ada sebesar 28,794 satuan sebelum ada nilai lain atau pembiayaan nilainya adalah nol. Koefisien regresi Pembiayaan (X) adalah 0,361 satuan dengan demikian, dapat diartikan bahwa variabel Pembiayaan berpengaruh terhadap Laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba (Y) sebesar 0,361 satuan artinya apabila pembiayaan ditingkatkan satu satuan maka Laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba akan meningkat sebesar 0,361 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Koefisien Korelasi (*r*)

Koefisien korelasi dipergunakan untuk hubungan dari variabel pembiayaan terhadap laba pada pengusaha konveksi Kanagarian Batu Taba dapat dilihat pada tabel pada lampiran. Dari hasil koefisien korelasi diperoleh nilai R sebesar 0,378 artinya hubungan dari variabel pembiayaan terhadap laba pengusaha konveksi Kanagarian Batu Taba masuk dalam kategori erat, variabel pembiayaan memiliki hubungan yang erat terhadap laba pengusaha konveksi Kanagarian Batu Taba.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji F (uji serentak)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama di uji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara bersama-sama di perlihatkan pada lampiran. Dalam hasil uji F di dapat nilai signifikansi 0.033

dan F hitung 5,011. Ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat yaitu Pembiayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, karena nilai signifikannya 0,033 < 0,05, sehingga pengujian hipotesis secara bersama-sama dapat diterima.

b. Uji t (uji persial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba. Berdasarkan perhitungan dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis dalam penelitian ini "Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan (X) terhadap Laba pada Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba. Hasil pengolahan data dengan uji t diketahui bahwa nilai hasil uji t dari variabel pembiayaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,033. Jika nilai signifikan dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033 < 0,05. Jika nilai signifikansi (sig) atau nilai probalilitas (probanility) lebih kecil dari tingkat signifikan maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dilihat dari pengujian hipotesis secara persial juga memiliki pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dengan laba pada Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba, karena tingkat nilai *alpha* yang ditetapkan lebih besar dari tingkat signifikan yang diperoleh sehingga pengujian hipotesis secara persial dapat diterima, begitu juga pengujian hipotesis secara bersama-sama maka di dapat hasilnya bahwa variabel pembiayaan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba pada pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba sehingga hipotesis yang diajukan secara bersama-sama dapat diterima.

Dilihat dari pengujian hipotesis secara persial juga memiliki pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dengan laba pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba karena tingkat nilai *alpha* yang ditetapkan lebih besar dari tingkat signifikan yang diperoleh sehingga pengujian hipotesis secara persial dapat diterima.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen, apakah memiliki kontribusi atau tidak memiliki kontribusi sama sekali. Dari hasil uji koefisien determinan diperoleh nilai R (R *square*) sebesar 0,143 artinya kontribusi dari variabel Pembiayaan terhadap Laba Pengusaha Konveksi di Kanagarian Batu Taba adalah sebesar 14,3% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan ini.

Dari hasil uji koefisien determinan menunjukkan bahwa masih banyak lagi variabel yang mempengaruhi laba pada pengusaha konveksi Kanagarian

Batu Taba karena nilai yang dihasilkan dari uji koefisien determinan belum sampai seratus persen sehingga masih banyak faktor lain yang mempengaruhi laba pada pengusaha konveksi Kanagarian Batu Taba selain dari variabel yang penulis teliti ini.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba artinya apabila pembiayaan lebih ditingkatkan lagi dari yang sudah ada sekarang ini maka pendapatan para pengusaha konveksi juga akan mengalami peningkatan karena memilki pengaruh positif searah, sehingga apabila salah satu variabel mengalami peningkatan maka pendapatan juga akan mengalami peningkatan dengan sendirinya, dengan temuan **Y = 28,794 + 0,361 X,** dengan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 28,794 satuan, hal ini menunjukkan bahwa sebelum dipengaruhi variabel pembiayaan (X) sebagai variabel independen, maka laba pengusaha konveksi adalah sebesar 28,794 satuan dengan asumsi variabel lain nol.
2. Koefisien pembiayaan dalam meningkatkan laba memberikan nilai sebesar 0,361 satuan, artinya setiap satuan pada pembiayaan menambah peningkatan laba pengusaha konveksi sebesar 0,361X.

B. Saran

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan laba pengusaha konveksi oleh sebab itu, pengusaha konveksi lebih meningkatkan pembiayaan dengan memperbesar usaha melalui

pembiayaan, ini akan menimbulkan peningkatan pendapatan bagi pengusaha konveksi di Kanagarian Batu Taba, sehingga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Abu. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1980

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara,1998

Endrayanto Poly, V. Wiratna sujarweni, *Statistika Untuk Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012

Hendrayadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemem dan Ekonomi Islam*, Jakarta, Pranada Media Group, 2015

Karim Adiwarman,. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004

Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah,* Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007

Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005

Muhammad, *Manajamen Dana Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali, 2015

M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2007

Nurhendra, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pengusaha Konveksi di BMT Agam Madani Nagari Ampang Gadang*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2013)

Nurlan Nur Syamsi, *Indonesia Incoporated Berpilar Perbankan Syariah dan UMKM*, Jakarta, Katulistiwa Press, 2008

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana, 2011

Rochaety, Ety, *Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2009

Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013

Sumarni, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012

Tambunan Tulus, *UMKM di Indonesia* Jakarta, PT.Galia Indonesia, 2009

Udang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Jakarta, Sinar Grafika.

Wahjono Sentot Imam, *Manajemen Pemasaran Bank*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013